

# PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

Jalan Asahan Km. 3 Kabupaten Simalungun

Simalungun, Sumatera Utara - 21174

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satker PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satker PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satker PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Simalungun, 14 Januari 2022  
Ketua Pengguna Anggaran,  
  
S. Anawiyah, S.Ag.  
NIP. 19730613 200012 2 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
F. Pengungkapan Penting Lainnya	47
VI. Lampiran dan Daftar	49

**PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN**  
**JL. ASAHAN KM.3 SIMALUNGUN**  
**TELEPON 0622 7551665, FAXIMILE 0622 7551665**

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Satker PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Simalungun, 14 Januari 2022  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
  
Ariawiyah, S.Ag.  
NIP. 19730613 200012 2 001



Laporan Keuangan Satker PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN Tahunan Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahunan Tahun 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp115.830.000,- atau mencapai (14,68) persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp98.825.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Tahunan Tahun 2021 adalah sebesar Rp.99.555.000,- atau mencapai 99,87 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp99.680.000,-.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp.4.162.257,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.4.162.257,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp4.162.257,-.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp115.830.000,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp102.008.445,- sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp13.821.555,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp0,-.

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp2.984.102,- dikurangi Surplus-LO sebesar Rp13.821.555,- dikurangi

dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(12.643.400,-) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp4.162.257,-.

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahunan Tahun 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN****SATKER PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN  
31 DESEMBER 2020***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2021		% thd Angg	31 DESEMBER 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>	<b>B.1</b>				
Pendapatan PNPB		98.825.000	115.830.000	117,21	108.226.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>98.825.000</b>	<b>115.830.000</b>	<b>117,21</b>	<b>47.026.000</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	0	0	0,00	0
Belanja Barang	B.4	99.680.000	99.555.000	99,87	91.400.000
Belanja Modal	B.5	0	0	0,00	0
Belanda Bantuan Sosial	B.6	0	0	0,00	0
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>99.680.000</b>	<b>99.555.000</b>	<b>99,87</b>	<b>91.400.000</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**II. NERACA**

**SATKER PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.3	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.4	0	0
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	0	0
Belanja Dibayar di Muka	C.8	0	0
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	0	0
Persediaan	C.10	4.162.257	2.984.102
Jumlah Aset Lancar		4.162.257	2.984.102
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	0	0
Peralatan dan Mesin	C.15	0	0
Gedung dan Bangunan	C.16	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.18	0	0
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	0	0
Aset Lain-Lain	C.22	0	0
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>4.162.257</b>	<b>2.984.102</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			

Uang Muka dari KPPN	C.24	0	0
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.26	0	0
Beban Yang Masih Harus Dibayar	C.27	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>4.162.257</b>	<b>2.984.102</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	4.162.257	2.984.102
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>4.162.257</b>	<b>2.984.102</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>4.162.257</b>	<b>2.984.102</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

### III. LAPORAN OPERASIONAL

## SATKER PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TAHUNAN TA 2021 DAN TAHUNAN TA 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TAHUNAN TA 2021	TAHUNAN TA 2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	115.830.000	108.226.000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>115.830.000</b>	<b>108.226.000</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	2.453.445	2.419.547
Beban Barang dan Jasa	D.4	70.155.000	41.652.000
Beban Pemeliharaan	D.5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	29.400.000	49.748.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>102.008.445</b>	<b>93.819.547</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>13.821.555</b>	<b>14.406.453</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.11		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>13.821.555</b>	<b>14.406.453</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>13.821.555</b>	<b>14.406.453</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**SATKER PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 31**  
**DESEMBER 2020**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TAHUNAN TA 2021	TAHUNAN TA 2020
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	2.984.102	2.723.257
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	13.821.555	14.406.453
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		0	0
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	0	0
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	0	0
JUMLAH		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(12.643.400)	269.089.300
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>4.162.257</b>	<b>286.219.010</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satker PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Satker PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Asahan Km. 3 Kabupaten Simalungun.

Satker PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Satker PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN berkomitmen dengan visi **“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- **Menyelenggarakan yang berkelanjutan** berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- **Membina secara efektif** Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- **Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.**
- **Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal** kepada para pemangku kepentingan.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## **A.3. Basis Akuntansi**

Satker PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan

menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Satker PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

##### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## *Pendapatan-LO*

### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Aset

#### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### Aset Lancar

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%

Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta

rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang

Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah

sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu

lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## *Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Satker PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN belum mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Pada saat pelaksanaan tidak terdapat perubahan kegiatan yang menimbulkan harus di revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tersebut. Berikut tabel anggaran awal dan anggaran setelah revisi:

Uraian	Tahunan TA 2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan PNB	98.825.000	98.825.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>98.825.000</b>	<b>98.825.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	99.680.000	99.680.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>99.680.000</b>	<b>99.680.000</b>

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp115.830.000,-*

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp115.830.000,- atau mencapai 117,21 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp98.825.000,-. Rincian pendapatan Satker PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN dapat dilihat sebagai berikut:

#### *Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	Tahunan TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	98.825.000	115.830.000	(14,68)
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0,00
Pendapatan Denda	0	0	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>98.825.000</b>	<b>115.830.000</b>	<b>(14,68)</b>

Realisasi Pendapatan Tahunan Tahun 2021 mengalami kenaikan 7,03 persen dibandingkan Tahunan Tahun 2020 yang dapat dirinci sebagai

berikut:

*Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan Tahun 2021 dan Tahunan Tahun 2020*

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	% Naik (Turun)
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	115.830.000	108.226.000	7,03
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0,00
Pendapatan Denda	0	0	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>115.830.000</b>	<b>108.226.000</b>	<b>7,03</b>

*Realisasi Belanja Negara Rp99.555.000,-*

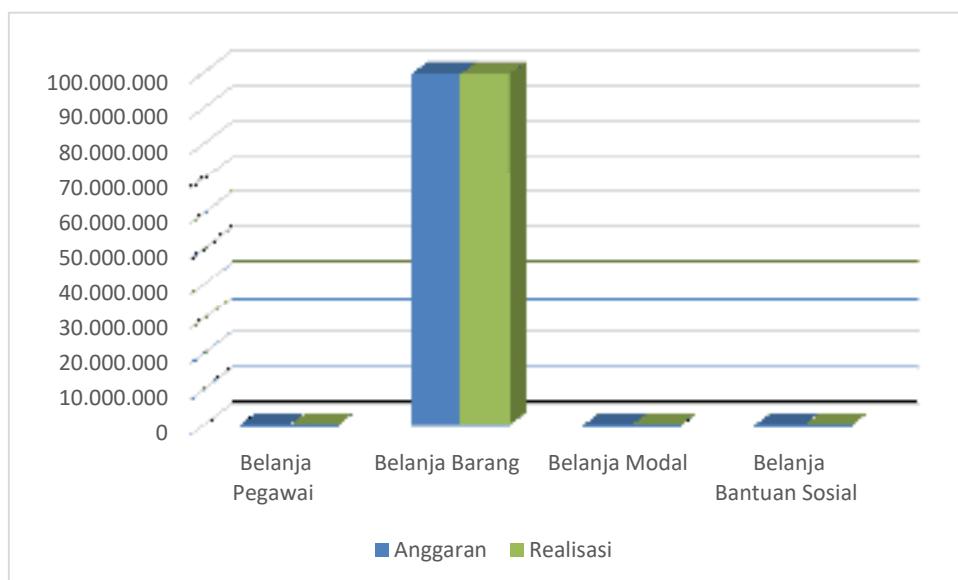
## B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahunan Tahun 2021 adalah sebesar Rp99.555.000,- atau 99,87% dari anggaran belanja sebesar Rp99.680.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahunan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan Tahun 2021*

Uraian	Tahunan TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	99.680.000	99.555.000	99,87
Belanja Modal	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>99.680.000</b>	99.555.000	99,87
Pengembalian		0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>99.680.000</b>	<b>99.555.000</b>	99,87

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Tahunan Tahun 2020, Realisasi Belanja Tahunan Tahun 2021 mengalami peningkatan 8,92% dibandingkan realisasi belanja pada Tahunan Tahun 2020. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Peningkatan jumlah yang berperkara secara prodeo dan
2. Peningkatan jumlah perkara yang sidang di luar Kantor Pengadilan;
3. Peningkatan biaya jasa layanan pos bantuan hukum

*Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan Tahun 2021 dan Tahunan Tahun 2020*

URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	99.555.000	91.400.000	8,92
Belanja Modal	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>99.555.000</b>	<b>91.400.000</b>	<b>8,92</b>

*Belanja Barang Non Operasional* **B.3 Belanja Barang Non Operasional**  
*Rp20.280.000,-*

Realisasi Belanja Pegawai Tahunan Tahun 2021 dan Tahunan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Barang Non Operasional adalah belanja atas biaya pembebasan biaya perkara (Prodeo) yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan. Realisasi belanja Tahunan Tahun 2021 mengalami kenaikan 14,89 persen dari Tahunan Tahun 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan jumlah yang berperkara secara prodeo dan;

## 2. Adanya penambahan biaya pembebasan biaya perkara

### Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan Tahun 2021 dan Tahunan Tahun 2020

URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	0	0	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0,00
Belanja Lembur	0	0	0,00
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Belanja Jasa  
Rp49.875.000,-

#### B.4 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Barang Tahunan Tahun 2021 dan Tahunan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp49.875.000,- dan Rp24.000.000,-. Realisasi Belanja Jasa Tahunan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 107,81 % dari Realisasi Belanja Jasa Tahunan Tahun 2020. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya jasa layanan pada pos bantuan hukum (posbakum) sepanjang Tahunan Tahun 2021.

### Perbandingan Belanja Jasa Tahunan Tahun 2021 dan Tahunan Tahun 2020

URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	0	0	0,00
Belanja Barang Non Operasional	20.280.000	17.652.000	14,89
Belanja Barang Persediaan	0	0	0,00
Belanja Jasa	49.875.000	24.000.000	107,81
Belanja Pemeliharaan	0	0	0,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	29.400.000	49.748.000	(40,90)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>99.555.000</b>	<b>91.400.000</b>	<b>8,92</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>99.555.000</b>	<b>91.400.000</b>	<b>8,92</b>

Belanja Perjalanan **B.5 Belanja Perjalanan Dalam Negeri**

*Dalam Negeri*  
*Rp29.400.000,-*

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri Tahunan Tahun 2021 dan Tahunan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp29.400.000,- dan Rp49.748.000,-. Belanja perjalanan dalam Negeri merupakan pengeluaran anggaran untuk perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung.

Realisasi Belanja Belanja Perjalanan Dalam Negeri Tahunan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar (40,90) % dibandingkan Tahunan Tahun 2020.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahunan Tahun 2021 dan Tahunan Tahun 2020*

<b>URAIAN</b>	<b>Triwulan III TA 2021</b>	<b>Triwulan III TA 2020</b>	<b>NAIK (TURUN) %</b>
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0,-

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2021 dan  
31 Desember 2020*

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Uang Tunai	0	0
Kuitansi UP	0	0
Bank BRI No. 653244017771000	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kas di Bendahara  
Penerimaan Rp0,-

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2021 dan  
31 Desember 2020*

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Uang Tunai	0	0
	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih -  
Piutang Perpajakan  
Rp0,-

### C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara

kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Piutang PNBP  
Rp0,-*

#### **C.4 Piutang PNBP**

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNBP 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Piutang PNBP	0	0
Piutang Lainnya	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Bagian Lancar  
Tagihan TP/TGR  
Rp0,-*

#### **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut :

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Bagian Lancar TPA  
Rp0,-

#### **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
1	-	0	0
2	-	0	0
3	-	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih –  
Piutang Lancar  
Rp0,-

#### **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar  
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

<b>Kualitas Piutang</b>	<b>Nilai Piutang Jk Pendek</b>	<b>% Penyisihan</b>	<b>Nilai Penyisihan</b>
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	0	0,00%	0
Kurang Lancar	0	0,00%	0
Diragukan	0	0,00%	0
Macet	0	0,00%	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	0	0,00%	0
Kurang Lancar	0	0,00%	0
Diragukan		0,00%	0
Macet		0,00%	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	0	0,00%	0
Kurang Lancar	0	0,00%	0
Diragukan	0	0,00%	0
Macet	0	0,00%	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

*Belanja Dibayar di Muka Rp0,-*

### **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

<b>Jenis</b>	<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
Pembayaran Internet	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0,-*

### **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Jenis	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pendapatan Jasa Pelatihan	0	0
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Persediaan*

*Rp4.162.257,-*

### C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp4.162.257,- dan Rp2.984.102,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Jenis	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	4.162.257	2.984.102
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>4.162.257.457</b>	<b>2.984.102</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan TP/TGR*

*Rp0,-*

### C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR 31 Desember 2021 dan  
31 Desember 2020*

No	Debitur	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1		0	0
2		0	0
3		0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

*Tagihan Penjualan  
Angsuran  
Rp0,-*

### C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

No	Debitur	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1		0	0
2		0	0
3		0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

*Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp0,-*

### C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang  
31 Desember 2021*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
---------------------	--------------------------------	-----------------	---------------------

<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	0	0,00%	0
Kurang Lancar	0	0,00%	0
Diragukan	0	0,00%	0
Macet	0	0,00%	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	0	0,00%	0
Kurang Lancar	0	0,00%	0
Diragukan		0,00%	0
Macet		0,00%	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Tanah  
Rp0,-

#### C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Agama Simalungun per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Nilai aset tetap Tanah selama Semester II Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	0
Penyitaan pengadilan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	0
2	-	-	0
3	-	-	0
4	-	-	0
5	-	-	0
6	-	-	0
<b>Jumlah</b>			<b>0</b>

Peralatan dan  
Mesin  
Rp0,-

### C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	
	0
	0
Mutasi kurang:	0
	0
<b>Saldo per 30 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>

Gedung dan  
Bangunan  
Rp0,-

### C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	
	0
Mutasi kurang:	0
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>

Jalan, Jaringan dan  
Irigasi Rp0,-

### C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	
	0
Mutasi kurang:	0
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	0

<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>
--	----------

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap Lainnya  
Rp0,-*

### **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset tetap tersebut berupa bahan perpustakaan monografi. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	0
-	0
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi Dalam  
Pengerjaan Rp0,-*

### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap Rp0,-*

### **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per dan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021*

<b>No</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>Nilai Perolehan</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Nilai Buku</b>
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak Berwujud*  
*Rp0,-*

### **C.21 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud salah satunya berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak berwujud*

<b>Uraian</b>	<b>Nilai</b>
Aplikasi Penatausahaan PNBPN	0
MYOB Accounting Profesional	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

*Aset Lain-Lain*  
*Rp0,-*

### **C.22 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai

berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
	0
<b>Mutasi kurang:</b>	
	0
	0
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>0</b>

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya Rp0,-*

### C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

<b>Aset Tetap</b>	<b>Nilai Perolehan</b>	<b>Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi</b>	<b>Nilai Buku</b>
Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	0
Alat Kantor	0	0	0
Alat Rumah Tangga	0	0	0
Alat Studio	0	0	0
Alat Komunikasi	0	0	0
Unit Alat Laboratorium	0	0	0
Alat Khusus Kepolisian	0	0	0
Komputer Unit	0	0	0
Peralatan Komputer	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aset Lain-lain	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang Muka dari  
KPPN Rp0,-

#### C.24 Utang Muka dari KPPN

Saldo Utang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Utang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp0,-

#### C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pengadilan Negeri Tabanan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	0	
Potongan pajak yang belum disetor	0	
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	0	
<b>Total</b>	<b>0</b>	

Pendapatan  
Diterima Dimuka  
Rp0,-

#### C.26 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Adapun rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Kantor Pengadilan Agama Simalungun per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

##### *Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	Jumlah
PT. Dua Dunia	0
PT. Barokah Dunia Akhirat	0

<b>Total</b>	<b>0</b>
--------------	----------

*Beban Yang Masih  
Harus Dibayar  
Rp0,-*

### **C.27 Beban Yang Masih Harus Dibayar**

Beban Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar  
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Ekuitas  
Rp0,-*

### **C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB  
Rp115.830.000,-

## D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp115.830.000,- dan Rp108.226.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020*

URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun)%
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	115.830.000	108.226.000	7,03
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0,00
Pendapatan Denda	0	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0,00
<b>Pendapatan PNB</b>	<b>115.830.000</b>	<b>108.226.000</b>	<b>7,03</b>

Pendapatan Jasa berasal dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi Semester II Tahun 2021.

Beban Pegawai  
Rp0,-

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun)%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0,00
Beban Lembur	0	0	0,00
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	0	0	0,00

<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---------------	----------	----------	-------------

*Beban Persediaan  
Rp2.453.445,-*

### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.453.445,- dan Rp2.419.547,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan 31 Desember Tahun 2021 dan  
31 Desember Tahun 2020*

<b>URAIAN JENIS BEBAN</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Naik (Turun)%</b>
Beban Persediaan konsumsi	2.453.445	2.419.547	1,40
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	0	0,00
Beban Persediaan bahan baku	0	0	0,00
Beban Persediaan barang hasil sitaan	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.453.445</b>	<b>2.419.547</b>	<b>1,40</b>

*Beban Barang dan  
Jasa  
Rp70.155.000,-*

### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp70.155.000,- dan Rp41.652.000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya tambahan jumlah perkara prodeo dan jasa layanan posbakum pada 31 Desember Tahun 2021. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember Tahun 2021 dan  
31 Desember Tahun 2020*

<b>URAIAN JENIS BEBAN</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Naik (Turun)%</b>
Beban Barang Operasional	0	0	0,00

Beban Barang Non Operasional	20.280.000	17.652.000	14,89
Beban Langganan Daya dan Jasa	0	0	0,00
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0,00
Beban Jasa Konsultan	49.875.000	24.000.000	107,81
Beban Sewa	0	0	0,00
Beban Jasa Profesi	0	0	0,00
Beban Jasa Lainnya	0	0	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>70.155.000</b>	<b>41.652.000</b>	<b>68,43</b>

*Beban  
Pemeliharaan Rp0,-*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020*

<b>Beban Jasa Pos dan Giro</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Naik (Turun)%</b>
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Beban Persediaan Bahan untuk Operasional	0	0	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp29.400.000,-*

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp29.400.000,- dan Rp49.748.000,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi banyaknya perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling di luar Pengadilan yang meningkat selama 31 Desember Tahun 2021. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.400.000	49.748.000	(40,90)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0,00
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>29.400.000</b>	<b>49.748.000</b>	<b>(40,90)</b>

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0,-*

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun)%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Beban Bantuan Sosial Rp0,-

#### D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2021	Tahun 2020	Naik (Turun)%
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0,-

#### D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Tahun 2021	Tahun 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan	0	0	0,00

Jaringan			
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Beban Amortisasi Aset Lainnya	0	0	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0,00
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Beban Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp0,-*

#### **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2021	Tahun 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Pajak	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Bukan Pajak	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional Rp0,-*

#### **D.11 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember Tahun 2021 dan  
31 Desember Tahun 2020*

URAIAN	Tahun 2021	Tahun 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0	0	0,00

Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	0	0	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	0	0,00
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

\*) *Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

*Pos Luar Biasa  
Rp0,-*

#### **D.12 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020*

<b>URAIAN</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>NAIK (TURUN) %</b>
Pendapatan Luar Biasa	0	0	0,00
Beban Keperluan Mendesak/Tak Terduga	0	0	0,00
Beban Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal*  
*Rp2.984.102,-*

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.984.102,- dan Rp4.162.257,-.

*Surplus LO*  
*Rp13.821.555,-*

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebesar Rp13.821.555,- dan Rp14.406.453,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai*  
*Aset*  
*Rp0,-*

### E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai*  
*Persediaan Rp0,-*

### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah/(kurang) atas nilai persediaan untuk 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 31 Desember Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

*Selisih Revaluasi Aset*  
*Tetap Rp0,-*

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Koreksi Aset Tetap  
Non Revaluasi Rp0,-

### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Semester II Tahun 2021 dan Semester II Tahun 2020 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

#### Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Semester II Tahun 2021

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

Koreksi Lain-Lain  
Rp0,-

### E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

#### Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp(12.643.400,-)

### E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun 2021 dan 31 Desember Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp(12.643.400,-) dan Rp17.129.610,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

#### Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	99.555.000
Ditagihkan ke Entitas Lain	(115.830.000)
Transfer Keluar	-

Transfer Masuk	3.631.600
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>(12.643.400)</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

#### **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember Tahun 2021, DDEL sebesar Rp99.555.000,- sedangkan DKEL sebesar Rp(115.830.000,-).

#### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Rp3.631.600,- terdiri dari persediaan berupa blanko akta cerai:

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Entitas Asal</b>
1	Blanko Akta Cerai	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
	<b>Jumlah</b>	

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,-.

#### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp0,- dari total Rp0,- (jika beda nilainya, ditulis manual) yang diterima sepanjang 2021

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

Rincian pengesahan Hibah untuk periode 31 Desember 2021 sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Pemberi Hibah</b>	<b>Bentuk Hibah</b>	<b>Nilai Hibah</b>
1	-	-	0
2	-	-	0
<b>Total Pengesahan</b>			<b>0</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah			0
<b>Jumlah</b>			<b>0</b>

Rincian Penerimaan Hibah Langsung 31 Desember Tahun 2021 disajikan pada lampiran.

*Ekuitas Akhir*  
*Rp4.162.257,-*

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.162.257,- dan Rp286.219.010,-.

### **F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.**

#### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak ada kejadian yang penting setelah tanggal neraca

#### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Tidak ada pengungkapan lain-lain setelah neraca

**Kantor Pengadilan Agama Simalungun**  
**Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,**  
**Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset**  
**Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021**

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm Peny s.d	Beban Peny	Akm Peny s.d	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2018	Per 30-06-2019	Per 30-06-2019	Per 30-06-2019
<b>A</b>	<b>Tanah</b>						
1	Tanah	-	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>						
1	Station Wagon	1	0	0	0	0	0
2	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	3	0	0	0	0	0
3	Sepeda Motor	5	0	0	0	0	0
4	Scanner (Universal Tester)	1	0	0	0	0	0
5	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	0	0	0	0	0
6	Mesin Fotocopy Folio	1	0	0	0	0	0
7	Lemari Besi/Metal	2	0	0	0	0	0
8	Filing Cabinet Besi	7	0	0	0	0	0
9	Mesin Absensi	1	0	0	0	0	0
10	LCD Projector/Infocus	2	0	0	0	0	0
11	Alat Kantor Lainnya	2	0	0	0	0	0
12	Meja Kerja Besi/Metal	2	0	0	0	0	0
13	Meja Kerja Kayu	9	0	0	0	0	0
14	Kursi Besi/Metal	67	0	0	0	0	0
15	Kursi Kayu	9	0	0	0	0	0
16	Meja Komputer	2	0	0	0	0	0
17	Meja Resepsionis	3	0	0	0	0	0
18	A.C. Split	4	0	0	0	0	0
19	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ))	1	0	0	0	0	0
20	Unit Power Supply	3	0	0	0	0	0
21	Camera Video	1	0	0	0	0	0
22	Handy Cam	1	0	0	0	0	0
23	Gordyin/Kray	1	0	0	0	0	0
24	Tangki Air	1	0	0	0	0	0
25	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	0	0	0	0	0
26	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	1	0	0	0	0	0

27	Switcher Manual	2	0	0	0	0	0
28	Alden Minifax Recorder	1	0	0	0	0	0
29	Unit Tape Recorder	2	0	0	0	0	0
30	P.C Unit	10	0	0	0	0	0
31	Lap Top	14	0	0	0	0	0
32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	0	0	0	0	0
33	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	0	0	0	0	0
34	External/ Portable Hardisk	4	0	0	0	0	0
35	Hub	1	0	0	0	0	0
36	Closed Circuit Television (CCTV)	8	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>						
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	0	0	0	0	0
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Jaringan</b>						
1	Jaringan Listrik	0	0	0	0	0	0
2	Jaringan Telepon	0	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>						
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>F</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>						
1	Barang bercorak kesenian	0	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>						
1	Software	0	0	0	0	0	0
2	Lisensi	0	0	0	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>		<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Beban Amortisasi

**PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN**  
**DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA**  
**PER 31 DESEMBER 2021**

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah (Rp.)	Sudah Disahkan (Rp.)	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	-	-	-	0	0	0	
<b>Jumlah</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **VI. Lampiran dan Daftar**

**KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER DESEMBER 2021  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
 UNIT WILAYAH : 005040700KD BA(005) ES1(04) SUMATERA UTARA  
 SATUAN KERJA : 403084 PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Tgl. Cetak 21/03/2022 11:10 PM  
 lap\_telaah\_satker --rekon17

Obyek Penelaahan	Nilai	Kondisi	
		Sesuai /	Tidak
1	2	3	
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN, NERACA PERCOBAAN, DAN KERTAS KERJA LK</b>			
Kelengkapan Komponen Face Laporan Keuangan			
1.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		
2.	Neraca		
3.	Laporan Operasional (LO)		
4.	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)		
5.	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)		
Kelengkapan Komponen Neraca Percobaan Keuangan			
1.	Neraca Percobaan Kas		
2.	Neraca Percobaan Akrua		
Kelengkapan Komponen Kertas Kerja Keuangan			
1.	KK Laporan Realisasi Anggaran		
2.	KK Neraca		
3.	KK Laporan Operasional		
4.	KK Laporan Perubahan Ekuitas		
<b>KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY FACE LK DENGAN FACE LK SISTEM e-Rekon&amp;LK</b>			
1.	Apakah semua cetakan (hardcopy) face laporan pada LK (LRA, Neraca, LO, dan LPE) telah menunjukkan hasil yang sama dengan face LK hasil cetakan dari Sistem e-Rekon&LK?		
<b>KESESUAIAN NERACA PERCOBAAN KAS</b>			
<b>PENGECEKAN SALDO PADA NERACA PERCOBAAN KAS</b>			

**KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER DESEMBER 2021**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
 UNIT WILAYAH : 005040700KD BA(005) ES1(04) SUMATERA UTARA  
 SATUAN KERJA : 403084 PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Tgl. Cetak 21/03/2022 11:10 PM  
 lap\_telaah\_satker --rekon17

Obyek Penelaahan		Nilai	Kondisi	
			Sesuai /	Tidak
1		2	3	
1.	Apakah total akhir Saldo Awal Neraca Percobaan Kas (total akun 1 s.d. akun 8) telah bersaldo NIHIL?	0		
2.	Apakah total akhir Mutasi Neraca Percobaan Kas (total akun 1 s.d. akun 8) telah bersaldo NIHIL?	0		
3.	Apakah total akhir Saldo Akhir Neraca Percobaan Kas (total akun 1 s.d. akun 8) telah bersaldo NIHIL?	0		
4.	Apakah Neraca Percobaan Kas telah menyajikan data untuk seluruh akun yang seharusnya ada?			
<b>TELAAH PER KELOMPOK AKUN PADA NERACA PERCOBAAN KAS</b>				
1.	<b>AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)</b>			
	<i>Apakah total seluruh akun Pendapatan (41xxxx, 42xxxx) pada Neraca Percobaan Kas telah sesuai dengan total nilai Realisasi pada bagian Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah pada Face Laporan Realisasi Anggaran?</i>	0		
	<i>Total Jumlah akun Pendapatan (41xxxx, 42xxxx) pada Neraca Percobaan Kas (1)</i>	0		
	<i>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah" pada Face Laporan Realisasi Anggaran (2)</i>	0		
	<i>Selisih (1) - (2)</i>	0		
2.	<b>AKUN BELANJA (5xxxxx)</b>			
	<i>Apakah total seluruh akun Belanja (5xxxxx selain akun 59xxxx), pada Neraca Percobaan Kas telah sesuai dengan total nilai Realisasi pada bagian pada Face Laporan Realisasi Anggaran?</i>	0		
	<i>Total Jumlah akun Belanja (5xxxxx selain akun 59xxxx) pada Neraca Percobaan Kas (1)</i>	0		
	<i>Jumlah Belanja pada Face Laporan Realisasi Anggaran (2)</i>	0		
	<i>Selisih (1) - (2)</i>	0		
3.	<b>SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN</b>			
	<i>Apakah total seluruh akun Pendapatan (41xxxx, 42xxxx, 498xxx), Belanja (5xxxxx selain akun 54xxxxx, 55xxxx, 56xxxxx, 58xxxx, 59xxxx) pada Neraca Percobaan Kas telah sesuai dengan total nilai Surplus (Defisit) Anggaran pada Face Laporan Realisasi Anggaran?</i>	0		
	<i>Total Jumlah akun Pendapatan (41xxxx, 42xxxx, 498xxx), Belanja (5xxxxx selain akun 59xxxx) pada Neraca Percobaan Kas (1)</i>	0		

**KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER DESEMBER 2021  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
 UNIT WILAYAH : 005040700KD BA(005) ES1(04) SUMATERA UTARA  
 SATUAN KERJA : 403084 PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Tgl. Cetak 21/03/2022 11:10 PM  
 lap\_telaah\_satker --rekon17

Obyek Penelaahan	Nilai	Kondisi	
		Sesuai /	Tidak
1	2	3	
<i>Jumlah Surplus (Defisit) Anggaran pada Face Laporan Realisasi Anggaran (2)</i>	0		
<i>Selisih (1) - (2)</i>	0		
<b>KESESUAIAN NERACA PERCOBAAN AKRUAL</b>			
<b>PENGECEKAN SALDO PADA NERACA PERCOBAAN AKRUAL</b>			
1.	Apakah total akhir Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual (total akun 1 s.d. akun 8) telah bersaldo NIHIL?	0	
2.	Apakah total akhir Mutasi Neraca Percobaan Akrual (total akun 1 s.d. akun 8) telah bersaldo NIHIL?	0	
3.	Apakah total akhir Saldo Akhir Neraca Percobaan Akrual (total akun 1 s.d. akun 8) telah bersaldo NIHIL?	0	
4.	Apakah Neraca Percobaan Akrual telah menyajikan data untuk seluruh akun yang seharusnya ada?		
<b>TELAAH PER KELOMPOK AKUN PADA NERACA PERCOBAAN AKRUAL</b>			
1.	<b>AKUN ASET (1xxxxx)</b>		
	<i>Apakah total seluruh akun Aset (1xxxxx) pada Neraca Percobaan Akrual (Saldo Akhir) telah sesuai dengan total nilai pada bagian JUMLAH ASET pada Face Neraca?</i>	0	
	<i>Total Jumlah akun Aset (1xxxxx) pada Neraca Percobaan Akrual (Saldo Akhir) (1)</i>	0	
	<i>Total JUMLAH ASET pada Face Neraca (2)</i>	0	
	<i>Selisih (1) - (2)</i>	0	
2.	<b>AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)</b>		
	<i>Apakah total seluruh akun Kewajiban (2xxxxx) pada Neraca Percobaan Akrual (Saldo Akhir) telah sesuai dengan total nilai pada bagian JUMLAH KEWAJIBAN pada Face Neraca?</i>	0	
	<i>Total Jumlah akun Kewajiban (2xxxxx) pada Neraca Percobaan Akrual (Saldo Akhir) (1)</i>	0	
	<i>Total JUMLAH KEWAJIBAN pada Face Neraca (2)</i>	0	
	<i>Selisih (1) - (2)</i>	0	











**KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER DESEMBER 2021  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
 UNIT WILAYAH : 005040700KD BA(005) ES1(04) SUMATERA UTARA  
 SATUAN KERJA : 403084 PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Tgl. Cetak 21/03/2022 11:10 PM  
 lap\_telaah\_satker --rekon17

	Obyek Penelaahan	Nilai	Kondisi	
			Sesuai /	Tidak
	1	2	3	
	<i>Penjelasan Mutasi Saldo:</i>	0		
	<i>Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan</i>	0		
	<i>Koreksi Pembukuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan / Penyebab Lainnya</i>	0		
	<i>Total Rincian Penjelasan Mutasi Saldo (2)</i>	0		
	<i>Selisih (1) - (2)</i>	0		
5.	Pengujian Saldo Aset Tetap Lainnya Akhir Tahun = Saldo Aset Tetap Awal Tahun + Mutasi Saldo Aset Tetap			
	<i>Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya</i>	0		
	<i>Saldo Awal Aset Tetap Lainnya</i>	0		
	<i>Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya (1)</i>	0		
	<i>Penjelasan Mutasi Saldo:</i>	0		
	<i>Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</i>	0		
	<i>Koreksi Pembukuan Aset Tetap Lainnya / Penyebab Lainnya</i>	0		
	<i>Total Rincian Penjelasan Mutasi Saldo (2)</i>	0		
	<i>Selisih (1) - (2)</i>	0		
<b>ANALISIS KESESUAIAN LO, LRA, NERACA</b>				
1.	Pengujian nilai Pendapatan Pajak (LO) = Pendapatan Pajak (LRA) - Saldo Piutang Pajak Awal Tahun + Saldo Piutang Pajak Akhir Tahun + Saldo Awal Pendapatan Pajak Diterima di Muka - Saldo Akhir Pendapatan Pajak Diterima di Muka			
	<i>Pendapatan Pajak LO (1)</i>	0		
	<i>Pengujian Perhitungan:</i>	0		
	<i>Realisasi Pendapatan Pajak (LRA)</i>	0		





